

Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Untuk Mencegah Terjadinya Human Trafficking Melalui Tawaran Bekerja Di Luar Negeri

Parlaungan Gabriel Siahaan ^{a,1}, Novridah Reanti Purba ^{b,2}, Dianisa Sinaga ^{c,3}, M Abdul Aziz Kalam Dalimunthe ^{c,4}, Ririn Ambarwati ^{c,5}

^a Universitas Negeri Medan, Indonesia

¹ dianisasinaga2004@gmail.com*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia melalui tawaran bekerja di luar negeri, dengan fokus pada situasi di Tanjung Morawa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai fokus, yang memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran pemerintah daerah dan tingkat pemahaman masyarakat terkait risiko perdagangan manusia. Melalui wawancara, data dikumpulkan untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemahaman masyarakat tentang risiko perdagangan manusia masih rendah, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti program edukasi melalui berbagai platform, dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran dan mengurangi potensi terjadinya perdagangan manusia. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya pencegahan perdagangan manusia dan menekankan perlunya terus memantau serta meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

ABSTRACT

This research aims to explore the role of local governments in providing education to the community to prevent human trafficking through offers to work abroad, with a focus on the situation in Tanjung Morawa. The research method used is a qualitative approach with case studies as the focus, which makes it possible to gain an in-depth understanding of the role of local government and the level of community understanding regarding the risk of human trafficking. Through interviews, data was collected to find out the prevention efforts carried out by the local government. The research results show that although public understanding of the risks of human trafficking is still low, preventive measures taken by village governments, such as educational programs through various platforms, can be an effective means of increasing awareness and reducing the potential for human trafficking to occur. This research highlights the important role of local governments in efforts to prevent human trafficking and emphasizes the need to continue monitoring and increasing outreach and education efforts to the community.

Informasi Artikel

Diterima : 12 Mei 2024

Disetujui: 21 Mei 2024

Kata kunci:

Peran Pemerintah, Edukasi Masyarakat, Pencegahan Human Trafficking

Article's Information

Received: 12 May 2024

Accepted: 21 May 2024

Keywords:

Role of Government, Public Education, Prevention of Human Trafficking

Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Menurut Wasistiono (2001), tugas pemerintah daerah melibatkan tiga peran utama dalam menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan umum, peran pembangunan, dan peran perlindungan.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang padat, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang mencukupi bagi masyarakatnya. Nugroho

dan Roeslian menyebutkan beberapa alasan di balik munculnya perdagangan orang, termasuk masalah kemiskinan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan meliputi minimnya lapangan kerja, kurangnya pengetahuan tentang dunia ketenagakerjaan dan usaha, serta ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, banyak penduduk Indonesia terpaksa bekerja di luar negeri. Namun, pekerjaan ini juga membuka peluang bagi praktik perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merujuk pada tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan utang ataupun bentuk-bentuk penipuan yang lainnya dengan tujuan eksploitasi.

Pemerintah daerah diharapkan untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas ini di tingkat lokal, termasuk dalam upaya koordinasi, sosialisasi, pemantauan, dan pelaporan terkait dengan pencegahan perdagangan manusia. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah daerah menjadi esensial dalam menegakkan komitmen nasional dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia.

Menurut Susiana & Fahham, 2015 Berdasarkan teori partisipasi Wilcox dalam buku *Perdagangan Orang Pencegahannya, Penanganan dan Perlindungan Korban*, yaitu adalah memeberikan informasi hal ini dapat berupa edukasi atau pun sosialisasi. partisipasi masyarkat, masyarakat berperan penting dengan kesediaannya untuk bergabung dan berbagi pendapat antara sesama. Partisipasi dalam bertindak, Setelah terlibat, masyarakat juga bersedia untuk menerapkan edukasi yang telah didiskusikan dengan pemerintah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya human trafficking melalui tawaran bekerja di luar negeri. Dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, sikap, dan pengalaman individu serta kelompok terkait isu tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat kemiskinan di Tanjung Morawa, meningkat akibat dari dampak pandemi Covid-19. Banyak karyawan yang terkena PHK dari pekerjaan, yang menyebabkan meningkatnya pengangguran. Selain itu, tidak sedikit masyarakat di Tanjung Morawa, yang masih mengalami keterbatasan dalam tingkat pendidikan. hal tesebut dapat mengaju masyarakat terpaksa mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, ketika tawaran pekerjaan di luar negeri muncul, seringkali masyarakat tidak menyadari bahwa itu bisa berujung pada perdagangan manusia. Oleh karena itu, pemerintah desa seharusnya memberlakukan langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia. Sejalan dengan yang tercantum di dalam buku *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam upaya pencegahan perdagangan manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Tanjung Morawa mengenai risiko human trafficking melalui tawaran bekerja di luar negeri masih rendah. Hal ini bisa saja terjadi diakibatkan belum adanya kasus perdagangan manusia melalui bekerja di luar negeri. Walaupun belum ada korban perdagangan manusia di daerah Tanjung Morawa tetapi pengetahuan terhadap resiko perdagangan manusia bagi masyrakat sangat lah penting. Bahkan mereka yang tidak menyadari tentang keberadaan perdagangan manusia di sekitarnya cenderung kurang berhati-hati

saat mencari pekerjaan, dan risiko menerima tawaran pekerjaan yang tidak jelas asalnya dapat meningkatkan kemungkinan terlibat dalam perdagangan manusia.

Pencegahan menjadi lebih efektif daripada menunggu munculnya kasus terlebih dahulu, karena ketika terjadi perdagangan manusia, mereka yang berhasil keluar dari situasi tersebut kemungkinan menghadapi risiko penyakit fisik akibat pekerjaan yang dipaksa dan dikekang, tidak hanya fisik kesehatan mental juga yang diakibatkan oleh stres, depresi, trauma, dan bahkan kasus bunuh diri tidak jarang terjadi sebagai akibat dari mereka yang mengalami seperti yang disebut oleh Trivaldus Bambar (2022)

Upaya untuk mencegah praktik perdagangan manusia, ibu Zulyah Kaidah sebagai pemerintah daerah Tanjung Morawa telah melakukan program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa bahayanya dampak perdagangan manusia bagi Masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa pemerintah daerah Tanjung Morawa telah menggunakan platform seperti perwiritan. Perwiritan adalah istilah lokal atau khas dari daerah tertentu dalam artian pertemuan atau forum diskusi yang diadakan oleh pemerintah desa atau kepala desa dengan penduduk setempat. Untuk menyampaikan informasi penting, memberikan pengumuman, atau berdiskusi tentang berbagai masalah yang terjadi di desa tersebut. pertemuan arisan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan berbagai kegiatan desa lainnya.

Pemerintah desa Tanjung Morawa menunjukkan bahwa adanya upaya dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia Dengan memanfaatkan momentum berbagai kegiatan komunitas, pesan-pesan pencegahan dapat tersebar secara luas dan efektif di masyarakat desa. Menurut Susiana,s (2015) Dalam buku Perdagangan Orang Pencegahann, Penanganan dan Perlindungan Korban salah satu pencegahan perdagangan manusia adalah program sosialisasi kepada Masyarakat.

Ibu zulyah menyampaikan bahwa yang terpenting dalam keinginan seseorang untuk bekerja sebagai TKI adalah mendapatkan bimbingan terlebih dahulu, baik dari keluarga maupun orang tua, terutama bagi mereka yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, sebagai orang tua atau keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga atau agen yang bertanggung jawab atas keberangkatan mereka telah terpercaya dan memberikan jaminan keamanan. Selain itu, keberangkatan harus transparan, yang berarti bahwa semua anggota keluarga atau orang tua yang terlibat harus mengetahui rencana menjadi pekerja TKI.

Setelah persetujuan dari keluarga selanjutnya adalah ijin dari kepala desa yang dimana kepala desa harus benar benar mengetahui jika tanda tangan tersebut adalah tangan keluarganya, dari situ baru lah kades ataupun pemerintah desa mendatangi surat izin atau surat pernyataan. Ibu Zulyah Menegaskann jikalau kita tidak memantau tanda tangan tersebut bisa saja anak yang ingin berangkat menjadi TKI tersebut menadatangi surat pernyataan.

Tingkat partisipasi masyarakat ditentukan oleh kondisi mereka, jika mereka sangat membutuhkan pekerjaan, terkadang mereka tidak dapat berpikir lebih lanjut dan hanya fokus pada upaya untuk mendapatkan penghasilan. Terlebih lagi, dengan penawaran gaji tinggi dan syarat yang tidak terlalu banyak, orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan tersebut cenderung langsung menerimanya. Sesuai dengan menurut Widiastuti, 2010 keinginan cepat kaya, hal ini memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang rentan terhadap perdagangan manusia.

Menurut ibu Zulyah selaku kepala desa Tanjung Morawa berasumsi Saat ada edukasi atau sosialisasi tentang perdagangan orang, masyarakat mungkin merasa takut akan risiko yang terkait. Namun, tak seorang pun tahu kapan bencana bisa datang, perekonomian seseorang bisa tiba-tiba

menurun dan dapat menyebabkan stres. Tanpa mempertimbangkan secara mendalam, mereka mungkin mengambil pekerjaan bergaji tinggi yang terlihat mudah, contohnya pekerjaan luar negeri berakhir sebagai korban perdagangan manusia.

Terlebih lagi, orang-orang dengan pengetahuan yang terbatas rentan menjadi korban. Itulah mengapa Ibu zulyah menekankan pentingnya memberikan nasihat atau amanah kepada mereka yang ingin bekerja di luar negeri. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi, masyarakat seharusnya sudah akrab dengan istilah perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap memantau masyarakat, agen, dan kantor yang mengirim TKI ke luar negeri untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia.

Simpulan

Dari hasil penelitian, bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan perdagangan manusia. Melalui edukasi, sosialisasi, dan dialog yang terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat, kesadaran akan risiko perdagangan manusia dapat ditingkatkan. Hal ini mencakup pemahaman akan tawaran pekerjaan di luar negeri yang berpotensi menjadi sarana perdagangan manusia.

Pemerintah desa Tanjung Morawa telah menunjukkan komitmen dalam melakukan program edukasi melalui berbagai platform, seperti perwritan, pertemuan arisan PKK, dan kegiatan desa lainnya. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan pentingnya kehati-hatian dalam mencari pekerjaan di luar negeri.

Namun, terdapat tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama terkait dengan keterbatasan pengetahuan dan kondisi ekonomi yang memaksa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program edukasi dan sosialisasi terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta upaya pencegahan yang proaktif dan berkelanjutan, diharapkan dapat mencegah risiko perdagangan manusia dan melindungi masyarakat, khususnya di Tanjung Morawa, dari dampak yang merugikan.

Referensi

- Trivaldus Bambar, A. (2022). Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan. *Unes Law Review*, 4(4), 488–501. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>
- Susiana, S., & Fahham, A. M. (2015). Perdagangan orang pencegahan, penanganan dan perlindungan korban. 134.
- Veda, J. A., Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, & Counter-Trafficking and Labour Migration Unit IOM. (2021). Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 1–130.
- Wasistiono S., 2001, Buku Materi Pokok Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta : Universitas Terbuka
- Widiastuti, T. W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Wacana Hukum*, 9(1), 107–120. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/308/270>
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia*, edisi 90, 1–12.